

PENGUMUMAN DAFTAR ANTREAN

LOKET PELAYANAN PENGADILAN PAJAK TANGGAL 6 APRIL 2021

Hal - hal yang perlu diperhatikan:

1. Tidak disediakan lahan parkir untuk pengunjung, lahan digunakan untuk ruang tunggu tambahan.
2. Kendaraan dapat *drop off* penumpang di area yang ditentukan.
3. Petugas Satuan Pengamanan akan memberikan nomor urut sesuai waktu kedatangan pemohon.
4. Tunjukkan kartu identitas kepada petugas Satuan Pengamanan.
5. Tunjukkan bukti terdaftar di daftar antrean (dapat berupa tangkapan layar pengumuman ini).
6. Bagi pendaftar yang tidak mendapatkan kuota antrean *online* dan tidak mendapat konfirmasi balasan, dimohon untuk mengirimkan e-mail pertanyaan melalui alamat e-mail berikut ini: informasipp@kemenkeu.go.id
7. Untuk ketentuan lain dapat dilihat di Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2020.
8. Pendaftar wajib mengikuti Jam Kedatangan sesuai dengan yang dituliskan pada pengumuman ini.
9. Sesuai SE-01/PP/2021, pengajuan banding/gugatan dan penyampaian dokumen persidangan dan surat-surat lainnya kecuali permohonan Peninjauan Kembali, diimbau untuk dilakukan melalui pos/ekspedisi tercatat.

LOKET A (PENGAJUAN BANDING/GUGATAN)

No.	Nama	Hari & Tanggal	Loket	Waktu
1	PT Win Textile	Selasa, 6 April 2021	A	10.00 - 11.00 WIB

LOKET B (PERMOHONAN IKH/SKSP)

No.	Nama	Hari & Tanggal	Loket	Waktu
1	Dara Indah Lestari	Selasa, 6 April 2021	B	10.00 - 11.00 WIB
2	Mulyono	Selasa, 6 April 2021	B	10.00 - 11.00 WIB
3	PT Pattra Aksa Jaya	Selasa, 6 April 2021	B	10.00 - 11.00 WIB
4	Ali Purwito Moesdradjad	Selasa, 6 April 2021	B	10.00 - 11.00 WIB

LOKET C (PENINJAUAN KEMBALI DAN KONTRA MEMORI PK)

No.	Nama	Hari & Tanggal	Loket	Waktu
1	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Selasa, 6 April 2021	C	10.00 - 12.00 WIB
2	PT Bina Balantak Utama	Selasa, 6 April 2021	C	10.00 - 12.00 WIB
3	PT Indowire Prima Industrindo	Selasa, 6 April 2021	C	10.00 - 12.00 WIB
4	PT Seamless Pipe Indonesia Jaya	Selasa, 6 April 2021	C	10.00 - 12.00 WIB
5	PT Wilmar Chemical Indonesia	Selasa, 6 April 2021	C	10.00 - 12.00 WIB

Penting:

Sehubungan dengan instruksi dari Pemerintah Pusat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pengadilan Pajak berkomitmen untuk menetapkan pembatasan pelaksanaan layanan administrasi secara tatap muka.